

**PERS RELEASE**  
**KUNJUNGAN KERJA KOMISI I DPR RI**  
**KE RESIMEN INDUK KODAM XIV/HASANUDDIN**

Komisi I DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke markas komando Resimen Induk Daerah Militer (Rindam) XIV/Hasanuddin, di Gowa, Sulawesi Selatan pada hari Jumat 20 September 2019). Kunjungan kerja tersebut dipimpin oleh Dr. Syarifudin Hasan, melakukan fungsi DPR bidang pengawasan, terkait dengan kesiapan sarana dan prasarana Rindam XIV/Hasanuddin dalam mendukung pelaksanaan program bela negara.

Dalam sambutannya, Dr. Syarifudin Hasan menyampaikan bahwa saat ini di Komisi I DPR RI sedang dibahas RUU Pengelolaan Sumber Daya Nasional, atau lebih dikenal dengan RUU PSDN. RUU ini salah satunya adalah membahas tentang Bela Negara, baik yang dilakukan oleh Komponen Utama yang dilakukan oleh TNI, maupun Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung yang berasal dari berbagai unsur dalam masyarakat. RUU ini sangat penting bagi masa depan NKRI dan menjadi payung hukum pelaksanaan Bela Negara

Kedatangan delegasi Komisi I DPR RI ini disambut langsung oleh Pangdam XIV/Hasanuddin, Mayjen TNI Surowahadi dan didampingi oleh Komandan Rindam XIV/Hasanuddin, Letkol Inf. Leo Agung. Dalam sambutannya Komandan Rindam XIV/Hasanuddin menjelaskan bahwa selama dua tahun terakhir ini pihaknya telah melakukan pendidikan dan pelatihan Bela Negara, baik untuk kepentingan TNI sendiri maupun untuk masyarakat umum. TNI membuka secara luas kerjasama dengan berbagai pihak dalam melaksanakan program Bela Negara.

Salah satu tugas pokok Rindam XIV/Hasanuddin adalah membantu menyelenggarakan latihan dan pendidikan bagi seluruh jajaran Kodam untuk menghasilkan prajurit yang profesional, handal, berkualitas dan memiliki militansi yang tangguh serta dicintai rakyatnya.

Terkait Bela Negara, tugas pokok Rindam XIV/Hasanuddin adalah menyelenggarakan pendidikan dan latihan tentang Bela Negara sesuai dengan petunjuk komando atas penyelenggaraan pembinaan peserta didik yang berhubungan dengan tata tertib, moral, disiplin dan kemampuan lainnya. Selain itu pencatatan untuk keperluan penilaian kondite bagi peserta didik, dan penyelenggaraan koordinasi dengan instansi terkait sesuai petunjuk Komandan Rindam

Karena itu, output dari pendidikan dan pelatihan Bela Negara tersebut adalah agar para kader memiliki kemampuan awal bela negara, sikap dan perilaku yang berkepribadian Pancasila, nasionalisme dan patriotisme yang tinggi serta memiliki semangat cinta tanah air. Selain itu juga kesadaran berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila dan negara sehingga terwujud karakter manusia Indonesia seutuhnya.

Tim yang terdiri dari 20 anggota Komisi I DPR RI itu juga memberikan banyak masukan terkait dengan pelaksanaan aksi Bela Negara. Salah satunya adalah perlunya materi tentang isu-isu internasional dan global karena dengan mengetahui isu internasional, para kader Bela Negara tahu akan sikap apa yang diambil dalam membela NKRI. Selain itu juga mengerti bagaimana menghadapi perang nonkonvensional, yaitu proxy war atau perang proksi, yang bertujuan untuk melahirkan propaganda yang dapat mengancam stabilitas wilayah bahkan negara. Diversifikasi peserta juga menjadi salah satu program sorotan utama agar para peserta saling mengenal budaya dan bisa saling bekerjasama.

Komisi I DPR RI juga menyarankan agar kurikulum program Bela Negara disusun sedemikian rupa agar generasi muda milenial tertarik dengan program Bela Negara, dengan berbagai permainan berbasis Informatika dan Teknologi (IT) yang disesuaikan dengan kebutuhan Program Bela Negara.